



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	12 (<i>dua belas</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Hari, Tanggal	:	Selasa, 30 Juni 2020
Pukul	:	09.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun Anggaran 2020
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Didiek Hartantyo; 3. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Subakti Syukur, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 09.39 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 30 Juni 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan pencairan hutang pemerintah ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp257.884.464.629,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) yang berupa kekurangan pembayaran Pemerintah terhadap kewajiban pelayanan publik, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2015 Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp108.276.981.441,-** (*Seratus Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*)
 - b. Tahun 2016 Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp2.224.897.079,-** (*Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*)
 - c. Tahun 2019 Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp147.382.586.109,-** (*Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Rupiah*)
2. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan pencairan hutang Pemerintah ke PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp5.025.315.656.121,-** (*Lima Triliun Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah*) yang berupa kekurangan pembayaran Pemerintah terkait pembelian lahan tahun 2016-2020, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian lahan tahun 2016, Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp112.904.333.961,-** (*Seratus Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*)
 - b. Pembelian lahan tahun 2017, Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp489.372.638.112,-** (*Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*)
 - c. Pembelian lahan tahun 2018, Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp595.866.297.458,-** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*)
 - d. Pembelian lahan tahun 2019, Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp3.519.816.989.568,-** (*Tiga Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*)
 - e. Pembelian lahan tahun 2020, Pemerintah kurang bayar sebesar **Rp307.355.397.022,-** (*Tiga Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*)
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Jasa Marga Tbk dan segera melakukan renegotiasi terhadap kreditur agar bisa menekan *cost of fund* sekecil mungkin sesuai dengan pembayaran hutang pemerintah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

4. Komisi VI DPR RI akan membahas terkait Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun 2020 kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada rapat Pleno Komisi VI DPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.27 WIB.

Jakarta, 30 Juni 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.
A-103